



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM BADAN LEGISLASI DALAM RANGKA  
PERSIAPAN PENYUSUNAN PROLEGNAS RUU TAHUN 2025—2029 DAN  
PROLEGNAS RUU PRIORITAS TAHUN 2025**

**MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2024—2025  
TANGGAL 31 OKTOBER 2024**

---

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 7
Jenis Rapat	: Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Kamis, 31 Oktober 2024
Waktu	: Pukul 13.31 WIB s.d pukul 16.28 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi
A c a r a	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK);</li><li>2. Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR); dan</li><li>3. Institute For Criminal Justice Reform (ICJR)</li></ol> terhadap persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025
Ketua Rapat	: Martin Manurung, S.E., M.A.
Sekretaris	: Widiharto, S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 48 Orang Hadir, 5 Izin dari 8 Fraksi - Narasumber <ol style="list-style-type: none"><li>1. Khotimun Sutanti, Koordinator Pelaksana Asosiasi Harian LBH APIK beserta jajaran;</li><li>2. Rendy N. S. Umboh, Koordinator Nasional JPPR beserta jajaran;</li><li>3. Iftahsari, Peneliti ICJR beserta perwakilan.</li></ol>

## **I. PENDAHULUAN.**

1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan LBH APIK, JPPR, dan ICJR dalam rangka persiapan Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua Badan Legislasi Martin Manurung, S.E., M.A.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.31 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025.

## **II. KESIMPULAN.**

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan LBH APIK, JPPR, dan ICJR dalam rangka persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 menyetujui/menyepakati RUU dari Narasumber menjadi bahan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan Prolegnas yaitu sebagai berikut:

1. LBH APIK mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:
  - a. Revisi UU Perkawinan
  - b. RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT)
  - c. RUU Kesejahteraan dan Keadilan Gender (RUU KKG)
  - d. RUU Sistem Peradilan Keluarga
  - e. Revisi UU No.16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
  - f. Revisi KUHAP
  - g. Penggantian UU No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
2. JPPR mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:
  - a. RUU tentang Kesenjangan
  - b. RUU tentang Parliamentary Threshold
  - c. RUU tentang Presidential Threshold
  - d. RUU tentang Amandemen UU Pilkada atau kodifikasi UU Pemilu dan UU Pilkada
  - e. RUU tentang Tentang Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Tingkat Provinsi/Kab/Kota Pasca Kesenjangan Pemilu 2024
3. ICJR mendorong dan mengusulkan beberapa RUU untuk dapat masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2025, yaitu:

- a. Revisi KUHAP
- b. Revisi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. RUU Advokat
- d. RUU Penyadapan
- e. RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam UU dan Peraturan Daerah
- f. Revisi UU 12/2011 jo UU 13/2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan dan Revisi UU 23/2004 tentang Pemerintah Daerah
- g. Revisi UU No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
- h. RUU Bantuan Korban

### III. PENUTUP.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Legislasi dengan LBH APIK, JPPR, dan ICJR dalam rangka persiapan penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025—2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025, ditutup pukul 16.28 WIB.

Jakarta, 31 Oktober 2024  
AN. KETUA RAPAT/  
SEKRETARIS

